
**PENJATIDIRIAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
DAN PEMERINTAH NEGARA MARITIM****Endro Tri Susdarwono^{1*}, Aswhar Anis²**^{1,2}Universitas Peradaban, IndonesiaEmail: ¹susdarwonoendrotri@gmail.com, ²midas999saniscara@gmail.com***Penulis Korespondensi**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi terkait penjatidirian masyarakat melalui pendidikan karakter bangsa dan pemerintah negara maritim. Penjatidirian ini dilihat dari pemahaman terkait karakter bangsa dan pemerintah negara maritim yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian kombinasi dengan menggunakan desain concurrent triangulation design. Lokus penelitian berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik random sampling, sedangkan teknik analisis data menggunakan pengujian hipotesis metode pengujian terhadap independensi, metode Kruskal-Wallis, dan metode jenjang terstrata Wilcoxon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Akan tetapi terdapat perbedaan pemahaman tersebut untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, perkotaan dan pesisir. Masyarakat pesisir sendiri tidak terdapat perbedaan pemahaman baik masyarakat yang tinggal di pesisir utara maupun di pesisir selatan.

Kata Kunci: karakter bangsa, kebijakan pemerintah, maritim, visi maritim

**COMMUNITY IDENTITY THROUGH NATIONAL CHARACTER EDUCATION AND
MARITIME GOVERNMENT****ABSTRACT**

This research aims to provide a description of community identity through national character education and maritime government. This identity can be seen from the understanding regarding the character of the nation and the government of maritime countries that is developing in society. The approach used in the research is a combination research using a concurrent triangulation design. The research locus is in Cilacap Regency, Kebumen Regency, Pemalang Regency, and Tegal City. The data collection technique uses a questionnaire with random sampling type, while the data analysis technique uses hypothesis testing, the independence testing method, the Kruskal-Wallis method, and the Wilcoxon stratified level method. This research concludes that people's understanding of the character of the nation and the character of the government of maritime countries is influenced by the level of education. However, there are differences in this understanding for people living in rural, urban and coastal areas. For coastal communities themselves, there is no difference in understanding between people living on the north coast and those on the south coast.

Keywords: national character; government policy; maritime; maritime vision

PENDAHULUAN

Terdapat dua cara pandang yang berbeda, yang masing-masing membawa konsekuensi terhadap cara hidup yang berbeda pula. Cara pandang pertama menganggap laut sebagai pemersatu. Dalam pandangan ini, laut dianggap sebagai penghubung yang menyatukan tanah air. Sedangkan cara pandang kedua menganggap laut sebagai pemisah. Pandangan ini melihat laut sebagai pemisah antara wilayah daratan satu dengan yang lainnya. Cara pandang kedua ini dikembangkan oleh penjajah untuk menghilangkan jati diri bangsa sebagai bangsa pelaut. Masyarakatnya dipinggirkan dari kodratnya sebagai masyarakat maritim. Pembangunan bangsanya lebih diorientasikan ke daratan dibandingkan dengan wilayah laut, sehingga mereka sangat jauh dalam memaknai arti pentingnya laut sebagai pemersatu (Porlida & Kafaridis, 2016). Arti kata maritim dalam KBBI adalah (1) segala sesuatu yang berkenaan dengan laut dan (2) berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kemaritimian bermakna hal-hal yang menyangkut masalah maritim atau sifat kepulauan Indonesia. Istilah maritim sering disinonimkan dengan kata bahari yang bermakna (1) dahulu kala; kuna, (2) indah; elok sekali, dan (3) mengenai laut.

Nilai natur kemaritimian sebagai bagian bumi yang telah kita diami merupakan milik sakral bersama, yang dianugerahkan alam kepada kita dan adalah warisan turun temurun kita, saat ini dalam kondisi yang sungguh memprihatinkan. Orang-orang Indonesia masih mengabaikan tentang kesadaran ciri kepulauan ini padahal sudah sekian puluh tahun merdeka, termasuk yang terdidik, semakin mengabaikan makna sejati dari archipelago (Marsetio, 2015). Indonesia Archipelago, yang merupakan terbesar dari jenisnya di dunia, dahulu dikenal dengan sebutan Nusantara. Sebutan ini, tanpa penjelasan yang lebih lanjut, dapat dan telah menimbulkan kesalahpahaman. Sejatinya, Nusantara bukanlah sekadar pulau-pulau yang dikelilingi oleh air, melainkan air yang di antara-nya terdapat pulau-pulau besar dan kecil. Dengan demikian, air di sini bukanlah sesuatu yang memisahkan, melainkan yang menghubungkan dan menyatukan satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun ada biduk yang memisah, setelah biduk tersebut lewat, pulau-pulau itu, dengan sifat alamiahnya, akan kembali menyatu. Tentu saja, perumpamaan ini bukan dimaksudkan dalam arti harfiah, melainkan sebagai kiasan.

Kesejatian dari *the archipelago meaning* ini jika terus menerus diabaikan, tentu air (lautan) yang mengelilingi pulau-pulau nusantara akan menjadi pemisah bukan pemersatu. Dan gambaran inilah yang semakin jelas terjadi sebagai akibat kelalaian kita selama ini, selama 78 tahun, terus menerus. Alih-alih berpandangan *maritime-based*, benak (*mindset*) kita menempa konsepsi *land-based*. Para pendiri bangsa memprediksi kemerdekaan nasional bakal kian meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pandangan *maritime-based*. Hal ini terbukti dengan salah satu ikrar yang mereka pilih untuk diucapkan sebagai jalan menyiapkan mental bangsa kearah tersebut. Aksi Sumpah Pemuda di tahun 1928, pemuda-pemudi kita jelas menyatakan bahwa mereka "Bertanah air satu". Yaitu "Tanah Air Indonesia" (Salim, 2014).

Generasi penerus setelah merdeka lebih bermental *land-based*. Berhubung segala perbuatan berawal dalam dan dari pikiran, maka pembangunan sosio-ekonomi yang dilakukan sebagai pengisi kemerdekaan, menjadi suatu perbuatan *land-based*, demikian pula pembangunan pertahanan dan keamanan (Marsetio, 2014). Soal ketahanan nasional ini perlu dikemukakan secara eksplisit mengingat Tanah Air kita luar biasa kaya. Pulau-pulau

Indonesia mengandung aneka ragam sumber daya alam, tetapi juga lautannya. Air dari lautan ini tidak hanya mengandung garam dan ikan, tetapi juga macam-macam mineral yang diperlukan sebagai bahan baku aneka kegiatan industri. Indonesia memiliki dasar lautan dengan gumpalan-gumpalan berbentuk kentang yang mengandung aneka bahan pertambangan yang identik dengan yang ada di lapisan tanah dari pulau-pulau. Indonesia memiliki dasar lautan yang terdapat sumber-sumber minyak dan gas bumi dan lain-lain mineral. Archipelago Indonesia yang luar biasa kaya ini wajar disebut sebagai Benua Keenam, mengingat luas permukaan wilayah Indonesia yang diakui oleh dunia internasional terdiri atas 75% air (lautan) dan (hanya) 25% tanah. Jadi memang pas dan tepat jika kita menyebut tanah tumpah darah kita Tanah Air, sebagai padanan istilah patrie (Prancis), Heimat (Jerman), moederland (Belanda), motherland (negara-negara Anglo-Saxon).

Menurut para pemikir Barat, sepanjang sejarah ilmu kemaritiman, telah mencetuskan gagasan dan teori-teori tentang sea power. Sebagian besar berpendapat bahwa penguasaan atas laut mengandung arti yang komprehensif. Dari sisi pertahanan, penguasaan laut berarti mampu menjamin penggunaan laut untuk kepentingan nasional dan mencegah lawan menggunakannya (Clorinda et al., 2019). Sedangkan dari sisi ekonomi, penguasaan atas laut dapat menggunakan laut sebagai penyokong ekonomi, baik dari sektor perdagangan, *industry maritime*, angkutan laut nasional, serta pemberdayaan sumberdaya maritim (Delanova & Yani, 2020). Sisi ilmu pengetahuan menyoroti bahwa penguasaan atas laut berarti penguasaan atas teknologi maritim terkini, baik dari sektor *hidrografi-oseanografi*, teknologi terapan penangkapan ikan, teknologi penginderaan, serta teknologi budi daya sumberdaya maritime yang bermuara pada terdukungnya eksplorasi laut melalui teknologi terkini (Asmara et al., 2020).

Menurut tokoh maritime, Prof. Hasjim Djalal, banyak negara kepulauan tapi bukan negara maritim. Terdapat negara yang lautnya sedikit tapi justru memiliki predikat negara maritim, ungunya. Ia mencontohkan Cina dan Amerika Serikat. Konsekuensi negara kepulauan seharusnya mewujudkan pada konsep Indonesia ke depan. "Coba kita pikirkan. Setelah 50 tahun Deklarasi Djuanda, kemana bangsa kita mau pergi. Pada 1957 penduduk Indonesia masih sekitar 80 juta jiwa, sekarang 240 juta jiwa. Untuk 50 tahun yang akan datang ke mana mau kita bawa lagi bangsa ini. Djuanda dulu membawanya kepada Kesatuan Nusantara," ujarnya. Dalam pemikiran beliau, untuk mewujudkan negara maritim Indonesia harus memiliki armada Angkatan Laut yang kuat. Armada Angkatan Laut itu akan menjadi pelindung kepentingan nasional, termasuk melindungi kekayaan alam di laut yang terletak di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dewasa ini, perlombaan antar bangsa dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di laut bukan lagi di wilayah dekat pantai, tetapi telah menjangkau wilayah lautan dalam yang sebagian di antaranya termasuk dalam wilayah ZEE (Hidayat & Ridwan, 2017).

Beberapa pemikir maritim Barat seperti Alfred Thayer Mahan (*The Influence of Sea Power upon History*), Julian Corbett (*Some Principles of Maritime Strategy*), sampai pada Geoffrey Till (*Sea Power: A Guide for the Twenty Century*) dan Sam Tangredi (*Globalization and Maritime Power*), mengangkat arti pentingnya aspek laut dan kekuatan maritim bagi kesejahteraan bangsa (Hadiwijaya, 2022). Mereka mengatakan bahwa kepentingan tersebut bisa terwujud bila memiliki elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membangun negara maritim. Umumnya hal ini dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu strategis dan operasional (Handayani, 2018).

Elemen dalam aspek strategis adalah: (i) karakter geografi, dekat dengan laut, memiliki pantai yang relative cukup panjang, (ii) karakter bangsa yang menganggap laut sebagai asset penting untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, (iii) ada sumber kekayaan alam yang mendukung untuk membangun kekuatan maritim, dan (iv) karakter pemerintah yang memiliki mindset berorientasi ke domain maritim. Sedangkan aspek operasional, lazimnya terdiri dari tiga elemen besar yaitu: (i) kekuatan pengamanan atau dalam istilah teknis *fighting instrument* untuk melindungi asset dan kepentingan, (ii) armada niaga, termasuk armada perikanan dan pelayaran rakyat, yang mampu mendukung mobilisasi ekonomi nasional, dan (iii) industri dan jasa yang mampu mendukung kedua elemen operasional meliputi berbagai kegiatan yang terkait dengan laut (Marsetio, 2014).

Raleigh memberikan deskripsi bahwa "Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia" (Haras, 2017), maka senada dengan pendapat Mahan bahwa "Laut untuk kehidupan, sumberdaya alam banyak terdapat di laut, oleh karenanya harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya". Begitu pula pendapat Nicholas J. Spykman (1893-1943) dengan Teori Daerah Batas (*Rimland Theory*). Menurutnya, penguasaan daerah jantung harus memiliki akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia (Rustam, 2017).

Wawasan Nusantara merupakan bingkai perwujudan visi maritim. Visi ini harus dilaksanakan secara holistik dan tidak dapat secara parsial. Secara komprehensif-integral cakupan visi ini meliputi seluruh aspek ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan) ditambah dengan keunggulan dalam kondisi geografi dan demografinya yang saling mengisi satu dengan lainnya (Salim, 2014). *Sea power* merupakan salah satu komponen yang memiliki *multiplier effect* bagi kejayaan negara kepulauan (Hermawan & Sutanto, 2022). Visi maritim tidak berarti berpaling dari visi agraris yang telah berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi maritim tidak juga berarti meniadakan visi dirgantara. Bagi negara kepulauan, membangun visi maritim berarti membangun negara melalui optimalisasi potensi sumberdaya nasional yang dimiliki oleh negara kepulauan. Visi maritim harus disertai tindakan nyata. Hal itu mutlak diwujudkan dalam bentuk suatu Negara Kepulauan seperti Indonesia. Visi maritim dimaksudkan untuk memaksimalkan dan mempercepat pencapaian cita-cita nasional.

Cara pandang dimana laut sebagai pemersatu bangsa, menyajikan beberapa keunggulan tersendiri. Laut mempunyai fungsi strategis dan sangat penting dalam menopang keberlanjutan dan kesinambungan hidup bagi masa depan suatu bangsa. Cara pandang ini mutlak harus dimiliki bangsa yang hidup di negara kepulauan yang wilayahnya lebih banyak lautan dibandingkan daratannya. Keberlanjutan dan kesinambungan ini tercermin dalam fungsi laut yang mampu menjadi jembatan sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumberdaya, media pertahanan negara, media pengembang pengetahuan dan teknologi serta media membangun suatu pengaruh bagi bangsa lain (Indriyani et al., 2022).

Pengelolaan yang baik terhadap sumberdaya-sumberdaya perairan nasional akan menghadirkan peluang dan sekaligus harapan dalam rangka mewujudkan bangsa yang sejahtera dan makmur di masa mendatang. Ketidakmampuan dalam pengelolaan ini akan mengundang banyak kedatangan pihak pihak lain untuk memanfaatkan dan mencuri potensi yang ada. Pemerintah harus mampu mengamankan dan melindungi wilayah laut tersebut (Irpri et al., 2019a). Keseriusan pemerintah diwujudkan dalam upaya, perhatian

dan pengerahan sumberdaya dalam rangka mewujudkan dominasi dan penguasaan terhadap laut Nusantara. Segala usaha ini harus dimulai diwaktu damai, tidak hanya serius ketika dalam keadaan perang saja, laut harus mampu dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa sebesar-besarnya (Rosmawandi, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi terkait penjatidirian masyarakat melalui pendidikan karakter bangsa dan pemerintah negara maritim. Penjatidirian ini dilihat dari pemahaman terkait karakter bangsa dan pemerintah negara maritim yang berkembang di masyarakat dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim terhadap tingkat pendidikan masyarakat; bagaimana pemahaman atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim oleh para responden yang merupakan masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat pesisir berbeda; apakah pemahaman masyarakat pesisir utara terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime adalah berbeda dengan pemahaman masyarakat pesisir selatan terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian kombinasi dengan menggunakan desain *concurrent triangulation design*. Lokus penelitian berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemasang, dan Kota Tegal. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik *random sampling*, sedangkan untuk teknik dalam penganalisisan data menerapkan pengujian hipotesis metode pengujian terhadap independensi, metode Kruskal-Wallis, dan metode jenjang terstrata Wilcoxon. Pengujian terhadap independensi diterapkan guna melakukan pengujian hipotesis terhadap ada atau tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dimana jumlah individu suatu populasi dikategorikan dalam dua variabel atau kategori dan masing-masing kategori terdiri atas beberapa alternatif. Pengujian hipotesis melalui metode Kruskal-Wallis digunakan karena pada kasus ini kelompok sampel yang dianalisis lebih dari dua. Sementara pengujian hipotesis dengan jumlah jenjang terstrata Wilcoxon digunakan untuk menentukan perbandingan antara dua kelompok sampel yang diperlakukan secara berbeda dan dikelompokkan dalam beberapa strata tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda secara bersama-sama membentuk wilayah negara Indonesia. Ketiga Kawasan laut ini memiliki peran sebagai jantung laut dalam perjalanan sejarah Nusantara. Penguasaan terhadap ketiga kawasan tersebut merupakan suatu daya kontrol yang efektif yang diterapkan pada masa kejayaan Majapahit. Hegemoni Majapahit terhadap ketiga kawasan laut tersebut mempengaruhi jalannya kejayaan kerajaan tersebut. Hegemoni ini kemudian diterapkan oleh VOC melalui orientasi kebijakan ekonomi kelautannya, diwujudkan dengan penguasaan terhadap Laut Jawa, Perairan Maluku, serta Selat Malaka. Kebijakan VOC ini mampu meredam kekuatan dan beberapa kerajaan pribumi yang berada di luar Kawasan tersebut. Penguasaan wilayah baik yang dilakukan Majapahit maupun VOC telah memposisikan Laut Jawa sebagai jantung laut atau dikenal sebagai heartsea (Hamid, 2013).

Aspek maritim sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak dikenalnya jalur perdagangan laut di Asia abad 1 Masehi, Nusantara bagian barat memetik manfaat dari interaksi perdagangan maritim. Di sepanjang jalur itu, terbentuk kantong-kantong niaga (emporium) yang berkembang menjadi kekuatan politik yang besar (imperium). Dalam proses itu tersiar agama Hindu dan Budha, kemudian Islam dan Kristen. Selain itu, terjadi juga proses alih pengetahuan dan kreasi teknologi perkapalan. Kapal galey misalnya, yang merupakan jenis kapal perang Arab diproduksi oleh pandai kapal Portugis, dan ditemukan di Kawasan timur Nusantara.

Risalah kejayaan dan kemunduran kekuatan maritime pribumi itu seyogyanya menjadi renungan bagi kita untuk membangun negara maritim Indonesia. Dalam kerangka itulah, pemahaman sejarah maritim sangat penting agar kita tidak terpukau selamanya dalam cakrawala sejarah Indonesia yang masih banyak menyuguhkan khasanah kedaratan.

Istilah negara maritim (*maritime state*), dalam *Oxford English Dictionary*, mengacu pada kekuatan armada dan angkatan laut. Belajar dari pengalaman negara maritim Inggris, Prancis, dan Belanda, Mahan merumuskan enam elemen pendukung suatu negara dapat berkembang menjadi negara maritim. Enam elemen tersebut dibagi atas dua bagian. Tiga elemen pertama berkaitan dengan kondisi alam, sedangkan tiga elemen lainnya menyangkut penduduk. Tiga elemen pendukung pertama yang berkaitan dengan factor alam sebagai berikut (Mustari et al., 2018; Nugraha & Sudirman, 2016; Prasetyo et al., 2019).

Posisi geografi (*geographical position*), Elemen ini sangat mempengaruhi intensitas dan keuntungan yang diperoleh dari hubungan suatu negara dengan negara lain, yang berada dalam satu kawasan laut tertentu. Pada konteks ini, posisi geografi Inggris lebih menguntungkan dan strategis dibandingkan dengan Belanda dan Prancis sebagai sebuah kekuatan laut. Hal itu turut mempengaruhi upaya-upaya negara tersebut dalam membangun sistem pertahanan negaranya, yang bertumpu pada kekuatan laut. Berbeda dengan negara daratan, yang secara geografi bertaut dengan wilayah negara lain, upaya pertahanannya dibangun berbasis pada darat. Upaya itu seirama dengan sumber ancaman terhadap negara yang tidak datang dari laut melainkan dari darat. Karena itu bagi negara darat, pertahanan laut kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, pertahanan darat sangat penting bagi kelangsungan negaranya. Posisi geografi Inggris sebagai sebuah negara di Kawasan Laut Tengah sangat strategis, baik dalam hubungan dengan negara lain di kawasan itu, juga karena letaknya yang kurang mementingkan pengembangan kekuatan darat untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain. Sebagai ilustrasi, Mahan mencontohkan Amerika Serikat sebagai negara besar, berada di antara dua kawasan laut besar, cukup menyulitkannya untuk mengembangkan kekuatan angkatan laut. Selain karena luas wilayah laut yang harus dikontrolnya, juga butuh biaya besar untuk membangun kekuatan laut untuk menjamin keamanan negaranya.

Kondisi wilayah (*physical conformation*), kondisi wilayah merupakan aspek pendukung kedua yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan kekuatan laut suatu negara. Aspek ini meliputi juga keadaan iklim beserta hasil alamnya yang jelas tidak terpisahkan dari upaya pengembangan kekuatan laut. Kondisi iklim berpengaruh terhadap bentuk pola pertahanan yang dijadikan cetak biru pembangunan kekuatan lautnya, sementara hasil alam terkait dengan kekayaan yang dimanfaatkan sebagai modal pengembangan dengan pengoperasian armada laut. Mahan memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa jika keadaan pantai suatu negara memberikan kemudahan bagi

masyarakat untuk turun ke laut, maka kegairahan akan muncul dalam mencari koneksi ke laut. Koneksi ini diwujudkan dengan upaya yang berkesinambungan melalui pelayaran dan perdagangan sehingga mensyaratkan keberadaan pelabuhan yang baik dan dalam jumlah yang memenuhi.

Luas wilayah territorial (*extent of territory*), luas wilayah jelas berpengaruh terhadap panjang garis pantai. Garis pantai ini memberikan suatu akses bagi masyarakat dalam mencari nafkah di seberang lautan. Keberadaan luas wilayah territorial ini harus disokong dengan dua elemen pertama yakni posisi geografi dan kondisi wilayah. Luas wilayah ini harus memberikan peluang yang besar dalam upaya pemanfaatan potensi berhubungan dengan daerah luar. Tiga elemen penting lain yang mendukung suatu negara menjadi negara maritim, berkaitan dengan aspek penduduk, sebagai berikut:

1) Jumlah penduduk (*number of population*)

Elemen yang dimaksudkan adalah keterkaitan kepadatan penduduk negaranya. Jumlah yang dimaksudkan merujuk pada jumlah penduduk yang lebih berorientasi ke laut dan bukan total dari penduduk suatu negara. Sebagai contoh, pada masa revolusi Prancis, jumlah penduduk Prancis lebih besar dibandingkan dengan Inggris. Tetapi, perhatian Prancis terhadap kekuatan laut secara umum bersifat imperior terhadap Inggris. Padahal, dalam aspek pengembangan kekuatan militer, Prancis lebih baik, tetapi tidak dimanfaatkannya dengan baik. Akibatnya, ketika terjadi perang laut di Eropa dalam abad ke-18, Prancis tidak dapat mengimbangi kekuatan laut Inggris. Negara Inggris berkembang menjadi kekuatan laut yang besar, dengan armada laut yang sangat kuat. "*England is at the present time the greatest maritime nation in the world*", kata Mahan.

2) Karakter/kebijakan nasional (*national character*)

Penguatan kebijakan maritim harus diletakkan sebagai fokus pemerintah jika memang bangsa ini menghendaki pengembangan kekuatan lautnya serta perluasan terhadap aktivitas perdagangan maritimnya. Pembangunan laut harus dijadikan dasar materi dalam setiap periode dan rezimnya. Kontinuitas ini sangat penting karena erat kaitannya dengan komponen kebutuhan dalam produksi barang untuk keberlangsungan perdagangan maritimnya. Aspek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan kekuatan laut.

3) Kebijakan pemerintah (*character of the governmental*)

Kebijakan pemerintah dengan lembaganya merupakan elemen berikutnya dalam upaya pembangunan sektor kelautan. Sejarah pembangunan di dunia telah menunjukkan bagaimana sifat dan pandangan tokoh-tokoh pemerintahan menjadi penentu dalam maju mundurnya suatu bangsa dalam bidang kekuatan laut. Dunia menggambarkan bagaimana suatu tokoh mampu menginspirasi keberhasilan pembangunan kekuatan laut negaranya dalam era kepemimpinannya, namun kemudian tidak mampu dilanjutkan oleh tokoh penerusnya. Negara Inggris harus dijadikan sebagai percontohan dimana Inggris mampu meneruskan dan mempertahankan keunggulan lautnya dan masyarakatnya sangat bangga memiliki kodrat maritim. Di Inggris siapa dan partai apapun yang memerintah, pemerintahnya selalu mendahulukan kepentingan nasionalnya dalam mencapai keunggulan lautnya.

Keberadaan wilayah Negara Indonesia di katulistiwa melahirkan keistimewaan tertentu yang merupakan suatu keunggulan. Posisi lintang bujurnya memberikan wilayah negara dengan tingginya antioksidan karena banyaknya sinar matahari yang diserap di sepanjang tahun. Keberadaan dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau merupakan eksekutif letak katulistiwa ini. Kelebihan dari posisi wilayah ini semestinya harus didalami dengan adanya berbagai perkembangan ilmu geografi yang ada sehingga kita akan mampu menjawab serangkaian pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Kenapa negeri ini dibuka dengan pulau yang bernama Sabang? Bukan suatu kebetulan karena sebuah nama memiliki sebuah makna dan bukan hanya rangkaian ilmu bumi.
- 2) Kenapa Bali lebih dikenal orang dari seluruh dunia daripada Indonesia? Bukan hanya keindahan alamnya karena keterkaitan penciptaan Tuhan terhadap surga dan replikanya.
- 3) Bisakah kita membongkar dan meluruskan sejarah yang dibuat oleh penjajah Belanda, yang nyata-nyata salah dan akan terbukti di kemudian hari karena merupakan ayat-ayat Tuhan? Karena memang penjajah tidak menginginkan kita menjadi bangsa yang besar.
- 4) Ketika melihat kekayaan alam yang luar biasa mampukah menggali negeri apakah sebenarnya negara ini? Kebudayaan asli Indonesia sudah berumur ribuan tahun sebelum peradaban Mesir maupun Mesopotamia mulai menulis di atas batu.

Pertanyaan diatas sebenarnya berhubungan dengan jati diri bangsa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mampu terjawab dengan baik karena penafikan yang terdapat dalam masyarakat bangsa ini untuk mengingkari kodratnya sebagai masyarakat maritim. Pertanyaan itu akan mampu terjawab dengan sendirinya apabila masyarakat bangsa Indonesia mampu mengenali dan mampu mengembalikan jati diri bangsa. Kenikmatan Tuhan yang sudah dilimpahkan pada bangsa ini harus mampu dijawab dengan rasa syukur yang luar biasa karena penuhnya sumber daya alam yang ada. Nikmat inilah yang harus diwujudkan dalam pembangunan masyarakat maritimnya sehingga tidak hanya segelintir orang saja yang mampu menikmati, akan tetapi seluruh komponen masyarakat maritim bangsa Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 151 orang responden, diperoleh hasil seperti pada Tabel 1.

Tabel 1: Pemahaman Karakter Bangsa dan Pemerintah Negara Maritim

Tingkat Pendidikan Masyarakat	Pemahaman Masyarakat atas Karakter Bangsa dan Pemerintah Negara Maritim			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Jumlah
Tinggi	25	35	11	71
Sedang	10	13	8	31
Rendah	5	12	32	49
	40	60	51	151

Berdasarkan Tabel 1, serangkaian langkah pengujian guna membuktikan kebenaran hipotesis dilakukan. Beberapa langkah yang harus ditempuh sebagai berikut:
 Dalam kasus ini, hipotesis nihil dan hipotesis alternative dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh pemahaman masyarakat atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim terhadap tingkat pendidikan masyarakat.

H_1 : Ada pengaruh pemahaman masyarakat atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime terhadap tingkat pendidikan masyarakat.

Pada kasus ini, taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Tabel 1 jumlah baris adalah 3 dan jumlah kolom adalah 3. Dengan demikian, derajat kebebasan yang digunakan adalah 4. Nilai ini diperoleh dari hasil kali derajat kebebasan baris $2(3-1)$ serta kolom $2(3-1)$. Sehingga, nilai khai-kuadrat dalam tabel untuk taraf signifikansi 0,05 serta derajat ebebasan 4 adalah 9,488.

Dari nilai tersebut, kriteria pengujian dirumuskan. Hipotesis nihil dalam kasus ini dinyatakan diterima jika

$$X^2 \leq 9,488$$

Sedangkan hipotesis nihil ditolak apabila

$$X^2 > 9,488$$

Nilai frekuensi yang diharapkan dalam setiap sel harus ditentukan terlebih dahulu sebelum perhitungan nilai khai-kuadrat dilakukan.

$e_{11} = \frac{(71 \times 40)}{151} = 18,81$	$e_{21} = \frac{(31 \times 40)}{151} = 8,21$	$e_{31} = \frac{(49 \times 40)}{151} = 12,98$
$e_{12} = \frac{(71 \times 60)}{151} = 28,21$	$e_{22} = \frac{(31 \times 60)}{151} = 12,32$	$e_{32} = \frac{(49 \times 60)}{151} = 19,47$
$e_{13} = \frac{(71 \times 51)}{151} = 23,98$	$e_{23} = \frac{(31 \times 51)}{151} = 10,47$	$e_{33} = \frac{(49 \times 51)}{151} = 16,55$

Setelah itu, nilai khai-kuadrat dihitung melalui perhitungan berikut ini. Nilainya adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{(25 - 18,81)^2}{18,81} + \frac{(35 - 28,21)^2}{28,21} + \frac{(11 - 23,98)^2}{23,98} + \frac{(10 - 8,21)^2}{8,21} + \frac{(13 - 12,32)^2}{12,32} \\ & + \frac{(8 - 10,47)^2}{10,47} + \frac{(5 - 12,98)^2}{12,98} + \frac{(12 - 19,47)^2}{19,47} + \frac{(32 - 16,55)^2}{16,55} \\ & = 2,04 + 1,63 + 7,03 + 0,39 + 0,04 + 0,58 + 4,91 + 2,87 + 14,42 = 33,90 \end{aligned}$$

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membandingkan antara nilai khai-kuadrat dalam tabel dengan nilai khai-kuadrat hasil perhitungan kemudian disesuaikan dengan kriteria pengujian didapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai khai-kuadrat adalah 33,90. Artinya, nilai tersebut lebih besar daripada nilai khai-kuadrat dalam tabel. Dengan demikian, hipotesis nihil ditolak dan menerima hipotesis alternative. Ternyata, pemahaman masyarakat atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat; sehingga tinggi rendah pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim. Materi terkait karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim harus diajarkan sedini mungkin di tingkatan sekolah sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman yang holistik terhadap karakter yang memang dimiliki oleh bangsa ini secara turun temurun.

Masalah peradaban merupakan keseluruhan totalitas kehidupan manusia pada suatu kawasan geografi, bukan hanya mencakup aspek kehidupan materiilnya, tetapi juga aspek

kehidupan rohaniannya. Dengan kata lain, peradaban itu merupakan representasi totalitas kehidupan manusia itu sendiri, dalam hubungan yang bersifat dinamis dengan lingkungan di sekitarnya. Manusia selain dibentuk oleh lingkungannya, juga mempunyai kemampuan untuk membentuk lingkungannya itu menurut cita dan wawasannya sendiri (Arif & Yanto, 2022). Tidaklah akan berlebihan jika dikatakan bahwa peradaban suatu masyarakat merupakan suatu kesatuan yang integral dengan kawasan di mana masyarakat itu berdiam, sehingga kita bisa berbicara tentang peradaban Eropa Barat, Timur Tengah, Afrika, India, Cina, Amerika, dan tentu saja Asia Tenggara. Peradaban maritim itulah yang menurut pemikiran penulis adalah *civilization destiny* dari bangsa ini yang harus kita bangkitkan kembali, yang pernah jaya pada masanya dahulu dalam fakta sejarah bahwa kawasan yang luas di sekitar Lautan Hindia dan Pasifik, di masa lampau memang merupakan bagian dari suatu peradaban maritim, yang dikenal dengan nama kebudayaan atau peradaban Austronesia (Till, 2018).

Pembangunan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari pemahaman jati diri budaya dan peradabannya. Jati diri budaya ini menyatu sebagai kesatuan yang utuh dalam tahap perkembangannya (Bueger, 2015). Cara pandang terhadap jati diri ini bisa rusak oleh bangsa sendiri tidak hanya oleh bangsa lain atau penjajah. Cara pandang yang memusuhi laut dan anggapan bahwa lautan merupakan pemisah kesatuan pulau-pulau merupakan sikap bangsa yang harus dihindarkan. Pemahaman bahwa pulau-pulau di perbatasan dengan negara lain yang dianggap sebagai pulau terluar merupakan konsekuensi negative yang harus dihilangkan, semestinya anggapan itu diganti dengan sebutan teras atau pulau terdepan wilayah bangsa. Konsekuensi ini teramat penting karena secara psikologis tidak memandang penduduk di kepulauan tersebut, seakan mereka bukan penduduk dari bangsa maritim Indonesia (Bueger & Edmunds, 2017). Karakter kemaritiman yang justru perlu ditonjolkan berupa karakter yang menganggap bahwa lautan mempersatukan rangkaian daratan. Karakter inilah yang harus menjadi penjatidirian bangsa dengan melihat kejayaan masa lalu dan mewujudkan cara pandang masa depan dengan lebih optimis dalam rangka melahirkan Indonesia baru menjadi negara maritim terbesar didunia.

Tujuan yang penting dalam penelitian ini adalah upaya untuk mensinkronkan pembangunan pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan asal muasal peradaban budaya masyarakatnya yang diwujudkan dengan penjatidirian yang sesungguhnya. Suatu pemikiran yang mampu menjadi latar belakang untuk perwujudan jiwa bahari bangsa. Kesadaran yang ditampilkan harus tertuju pada bagaimana upaya terhadap penguasaan kembali lautan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan menjadi adidaya seperti kejayaan nusantara dimasa lampau. Ungkapan "nenek moyangku seorang pelaut" harus segera diwujudkan dengan kesadaran masyarakatnya sebagai bagian dari komponen negara maritim. Usaha-usaha ini bukanlah merupakan suatu kemewahan, tetapi suatu keharusan sebagai kelanjutan dari kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang diwarisi oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang besar.

Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan bangsa ke depan dan keterkaitannya dengan sejarah masa lampau. Pertama: bagaimana bangsa ini menyadari sepenuhnya untuk kembali menyadari bahwasanya keberadaan sesungguhnya kita merupakan bangsa bahari yang tinggal di negara kepulauan; Kedua: bagaimana membangun bangsa ini yang bermartabat yaitu dengan membangun dan menjunjung nilai-nilai luhur keadatan yang diwariskan oleh pendahulu kita yang selaras dengan kepribadian bangsa; Ketiga: menyatukan kembali jati diri bangsa dalam pembangunan nasional sehingga menjadi jati diri bangsa yang kuat; Keempat: mari kita bangun patriot-patriot baru bangsa yang berazaskan nilai-nilai budaya maritim.

Buku dengan judul "*Architects of Deception the Concealed History of Freemasonry*" yang ditulis ditahun 2004 oleh Juri Lina seorang penulis Swedia dengan sangat gamblang mengungkapkan tiga cara untuk dapat melemahkan dan menjajah suatu negeri. Buku ini patut mendapatkan perhatian khusus dari bangsa Indonesia karena perkembangan jalannya bangsa kita mengarah seperti yang digambarkan oleh Juri Lina, meliputi: Kaburkan sejarahnya; Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya; dan Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitive. Usaha-usaha untuk meredam tesis dari Juri Lina ditunjukkan dengan pembuktian bagaimana kebudayaan yang sangat tinggi sudah dibangun oleh leluhur Indonesia. Fakta-fakta sejarah yang ada bahkan menunjukkan bahwa pada waktu itu Indonesia menjadi pusat daripada kebudayaan dunia. Tesis-tesis tersebut harus menguatkan kita untuk dapat lebih mensyukuri dan merasakan anugerah Tuhan yang menciptakan bangsa Indonesia dengan kodrat maritimnya. Kita harus bangkit dengan menyelaraskan pemikiran dan penyamaan visi maritim untuk menuju jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.

Survei dilakukan pada para responden yang menjadi bagian masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat maritim. Atas dasar survey yang dilakukan terhadap beberapa responden yang dijadikan sampel, diperoleh data tentang nilai terhadap pemahaman masyarakat atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime seperti digambarkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Nilai untuk Pemahaman Karakter Bangsa dan Karakter Pemerintah Negara Maritim

Masyarakat Perdesaan			Masyarakat Perkotaan			Masyarakat Pesisir			
Nomor	Nilai	Jenjang	Nomor	Nilai	Jenjang	Nomor	Nilai	Jenjang	
1	43	5.5	1	68	23.5	1	72	29.5	
2	67	21.5	2	49	15.5	2	47	12.5	
3	45	9	3	72	29.5	3	56	18	
4	70	26.5	4	50	17	4	42	4	
5	35	3	5	73	32	5	68	23.5	
6	65	20	6	67	21.5	6	70	26.5	
7	47	12.5	7	35	2	7	45	9	
8	73	32	8	73	32	8	60	19	
9	49	15.5	9	70	26.5	9	48	14	
10	70	26.5	10	45	9	10	35	2	
11	45	9	11	45	9				
			12	43	5.5				
Jumlah		181				223	158		

Tabel 2 menampakkan sejumlah angka yang menunjukkan nilai masing-masing responden. Terlihat ada beberapa nilai yang sama dan ada pula beberapa nilai yang berbeda. Dalam kasus ini, langkah pengujian hipotesis yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: Hipotesis nihil yang dirumuskan menyatakan bahwa pemahaman atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim oleh para responden yang merupakan masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat pesisir sama. Adapun hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa pemahaman atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim oleh para responden yang merupakan masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat pesisir berbeda. Jumlah kelompok sampel masyarakat yang dijadikan responden adalah 3. Sehingga, derajat

kebebasan yang diberlakukan adalah $2(3-1)$. Adapun taraf signifikansi yang digunakan sebesar 2,50%. Dalam tabel, nilai khai-kuadrat untuk taraf signifikansi 2,50% dan derajat kebebasan sebesar 2 adalah 7,378. Nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 7,378 tersebut selanjutnya dijadikan dasar perumusan kriteria pengujian serta kesimpulan. Dengan demikian, kriteria pengujian hipotesis yang diberlakukan pada kasus ini adalah bahwa hipotesis nihil diterima apabila

$$H \leq 7,378$$

Sedangkan hipotesis nihil ditolak jika

$$H > 7,378$$

Setelah perhitungan jumlah jenjang dilakukan seperti yang ada di tabel 2, nilai khai-kuadrat dihitung. Nilai khai-kuadratnya adalah:

$$\frac{12}{32 \times 33} \times \left(\frac{181^2}{11} + \frac{223^2}{12} + \frac{158^2}{10} \right) - (3 \times 33) = 10,304$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai H adalah 10,304. Nilai itu jelas lebih besar daripada nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 7,378. Sehingga sesuai dengan kriteria pengujian yang diberlakukan, hipotesis nihil ditolak dan menerima hipotesis alternative. Sehingga memang terdapat perbedaan terhadap pemahaman atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime oleh para responden yang merupakan masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat pesisir. Hasil pengujian ini menyatakan perlunya penyesuaian terhadap materi pendidikan terkait karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime. Sehingga masyarakat sebagai kesatuan yang holistik harus mempunyai pemahaman yang sama untuk menjatidirikan masyarakat sebagai bagian negara yang bercirikan maritim.

Tentu masih banyak detail yang bisa ditambahkan. Namun berapa banyak pun detail mencengangkan yang dapat kita sebutkan, ia akan tinggal menjadi data-data kosong jika kita gagal memberikan makna sehingga ia memiliki fungsi idealistis dan praktis bagi kita di masa kini. Sekurangnya kita mesti mampu mengidentifikasi makna-makna kekuatan kebaharian bangsa kita itu secara keseluruhan maupun secara sektoral, dalam bidang-bidang praktis yang kita butuhkan dan jalankan di masa sekarang.

Secara umum, kebudayaan yang diturunkan dari realitas dan kerja-kerja kemanusiaan masyarakat kelautan di atas memberi bukti kemampuan tentang kita dalam membangun sebuah peradaban yang kontribusinya dalam perkembangan dunia dan pertumbuhan zaman cukup signifikan. Kebudayaan bahari itu memang pertama ditandai oleh pengaruh dan saling ketergantungan masyarakat kita dengan laut dan air dalam satuan kecilnya.

Munculnya wilayah-wilayah perdagangan di sepanjang pesisir pulau-pulau besar Indonesia (bandar-bandar) membentuk watak dan karakter (bangsa) kita yang berbasis pada kenyataan dan fenomena-fenomena di seputar bandar itu. Itulah karakter yang ditandai oleh semacam sikap keterbukaan yang tidak xenofobik, yang memiliki daya resepsi tinggi terhadap kehadiran orang asing (lain, liyan, atau *the other*), egaliter, tenggang rasa dan mengutamakan mufakat demi harmoni, pikiran dan hati terbuka, hingga pada kapasitas kita hidup dalam masyarakat multikultural, serta mempraktikkan semacam *inter-cultural relationship*, dimana sebuah bentuk baru dari kebudayaan *hybrid* atau osmosik atau sintetik kemudian bisa dilahirkan.

Itulah semua ciri dasar dari karakter manusia bahari yang pada gilirannya akan memberi juga dasar bagi pembentukan dan pengembangan nilai-nilai sektoral, seperti dalam perdagangan, penataan negara, tata politik, berilmu pengetahuan, ber hukum dan bermasyarakat juga hingga cara beragama atau meyakini dan menjalankan ritual-ritual spiritual kita. Semua itu membentuk kebudayaan bahari yang sesungguhnya menjadi ideal

bagi masyarakat modern, seperti ciri kebudayaan itu yang demokratis, gotong-royong, pengakuan akan eksistensi lain, *community oriented*, tidak bias gender.

Semua ciri-ciri itu memang perlu mendapat perhatian yang lebih cermat dan valid secara ilmiah. Yang pada akhirnya akan memberi kita sebuah informasi menarik tentang ciri-ciri kebudayaan modern kita yang justru bertentangan – bahkan secara diametral – dengan budaya bahari di atas (Aritz & Walker, 2017). Apa yang kita dapatkan, kenakan, dan gunakan saat ini adalah ciri-ciri dari kebudayaan atau peradaban yang dalam sepanjang sejarah manusia menjadi semacam oposisi atau anti tesis dari adab maritime, yakni adab daratan atau kontinental. Implementasi terhadap konsekuensi Indonesia negara maritim belum ditunjukkan secara nyata yang semestinya diwujudkan melalui kesamaan visi dari seluruh aspek komponen bangsa. Paradigma fundamental harus diwujudkan apabila menghendaki adanya kesamaan visi dalam membangun pemahaman masyarakat tentang Indonesia sebagai negara maritime. Doktrin maritime yang ada harus diperkuat untuk menuju kesamaan visi pembangunan negara maritim.

Konstelasi geografis dan perjalanan bangsa tidak dapat kita pungkiri bahwa kodrat Indonesia memang lahir untuk menjadi sebuah negara maritim. Setiap individu harus menyadari dan memiliki pemahaman terhadap kodrat ini yang jauh sudah dilalui dan tertanam erat sejak berabad-abad lampau yang dipenuhi dengan cerita kepahlawan tentang keperkasaan dalam penguasaan lautan yang sangat luas (Hendrawan, 2020). Prestasi yang sudah ditorehkan pelaut-pelaut nusantara tidak dapat dinafikan begitu saja, bagaimana dalam tradisi nenek moyang kita tertanam kemampuan dalam mengawali hubungan-hubungan laut dengan melakukan arung samudera. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau yang sangat banyak meliputi lebih dari 17.449 pulau. Wilayah yang terdapat di persimpangan dunia, di antara dua benua dan dua samudera merupakan suatu anugrah Tuhan yang luar biasa. Seluruh komponen bangsa ini harus memiliki pemahaman yang sama bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan yang tersimpan sebagai sebuah misteri yang harus di ungkap secara bersama. Kebesaran kerajaan nusantara (Sriwijaya, Majapahit, Demak) jangan hanya dilihat dari aspek kesejarahan saja, namun bangsa Indonesia harus mencari pemahaman lebih mendalam konsep yang digunakan sehingga kerajaan-kerajaan ini dapat memainkan peran yang sangat besar sebagai sebuah kerajaan maritim.

Keberadaan wilayah Indonesia di daerah tropis dengan lintang 0⁰ membawa berkah sendiri dengan keberadaan flora dan fauna sebagai kekayaan sumber daya alamnya. Pertanyaan yang muncul, apakah kita sudah mampu memanfaatkan segala potensi sumber daya alam tersebut. Keistimewaan yang terdapat di laut sangat terlihat jika dibandingkan dengan lahan pertanian, laut tidak perlu dipupuk bahkan tidak perlu disemai, serta tidak perlu memberikan makan ikan untuk mengembangkannya. Semua kekayaan ini sebenarnya tinggal mengolah saja dengan dibungkus pembangunan negara maritim. Kenyataannya sekarang, potensi tersebut justru dimanfaatkan oleh orang asing, nelayan-nelayan kita tetap saja berada di garis kemiskinan yang ekstrim.

Sendi-sendi perekonomian negara kita harus mampu memanfaatkan keberadaan kompartemen strategis alur laut kepulauan yang dimilikinya yang sangat strategis karena terbentang dari timur ke barat melalui selat Lombok, Laut Jawa dan terbentang dari utara ke selatan. Aspek sosial-budaya dan pertahanan yang lahir dari klaim negara maritim juga harus diberi perhatian khusus oleh pemerintah pusat dan daerah karena merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari konsep negara maritim (Buntoro, 2019). Dengan pertahanan yang kuat akan mampu mengamankan kepentingan yang dimiliki dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menuju kemakmuran rakyat sebagai tujuan berbangsa dan bernegara. Pelayaran yang melintasi selat Malaka merupakan suatu *center of gravity* dari *international merchandise* yang bangsa Indonesia harus mampu memetik akan keberadaan jalur pelayaran tersebut.

Dari hasil survei terhadap masyarakat yang berada di pantai laut utara atau pesisir utara dan pantai laut selatan atau pesisir selatan didapatkan hasil seperti tertera dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Nilai dan Jenjang Terhadap Pemahaman Masyarakat

Karakteristik Pendidikan	Masyarakat Pesisir Utara		Masyarakat Pesisir Selatan	
	Nilai	Jenjang	Nilai	Jenjang
Perguruan Tinggi				
Responden 1	72	9.5	72	9.5
Responden 2	69	6	50	1
Responden 3	54	2	65	4.5
Responden 4	60	3	65	4.5
Responden 5	70	7.5	70	7.5
SMA/SMK				
Responden 1	60	4	65	6.5
Responden 2	40	1	54	3
Responden 3	46	2	63	5
Responden 4	68	8	65	6.5
Responden 5	70	9.5	70	9.5
SMP				
Responden 1	43	2	43	2
Responden 2	56	5.5	56	5.5
Responden 3	60	7.5	65	9
Responden 4	70	10	60	7.5
Responden 5	43	2	50	4
		79.5		85.5

Terlihat dalam tabel 3 bahwa jumlah nilai terhadap pemahaman atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim dengan karakteristik pendidikan yang berbeda dan berada di tempat pesisir yang berbeda pada dasarnya terdapat perbedaan pemahaman. Hanya apakah sebenarnya memang terdapat persamaan atau perbedaan pemahaman masyarakat yang berada di pesisir utara dengan masyarakat yang berada di pesisir selatan, perlu dilakukan serangkaian prosedur pengujian hipotesis dengan jumlah jenjang terstrata Wilcoxon. Adapun rangkaian langkah yang harus dilakukan dalam kasus ini adalah:

Hipotesis nihil menyatakan bahwa pemahaman masyarakat pesisir utara terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim adalah sama dengan pemahaman masyarakat pesisir selatan. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa pemahaman masyarakat pesisir utara terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah

negara maritim adalah berbeda dengan pemahaman masyarakat pesisir selatan terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime.

Dengan kecilnya jumlah sampel yang digunakan sehingga taraf signifikansi yang digunakan sebesar 1%. Adapun jumlah strata (dalam hal ini karakteristik pendidikan) adalah 3 serta ukuran sampel dalam setiap strata (jumlah responden setiap karakteristik pendidikan) adalah 5. Dalam tabel, nilai R bagi jumlah strata 3 dan ukuran sampel setiap strata 5 serta taraf signifikansi 1% adalah 61. Kriteria pengujian yang diberlakukan pada kasus ini adalah bahwa hipotesis nihil diterima apabila

$$R \geq 61$$

Sedangkan hipotesis nihil ditolak jika

$$H < 61$$

Apabila prosedur pengujian telah sampai pada tahapan ini, jumlah jenjang terstrata dihitung terlebih dahulu untuk menentukan nilai R. Jumlah jenjang ditampilkan dalam tabel 3. Dari langkah perhitungan yang dilakukan, jumlah jenjang terstrata keseluruhan yang diperoleh adalah 79,5 (jumlah nilai pemahaman masyarakat pesisir utara) dan 85,5 (jumlah nilai pemahaman masyarakat pesisir selatan). Nilai R hasil perhitungan adalah nilai yang lebih kecil. Pada kasus ini, nilai R hasil perhitungan adalah 79,5.

Nilai R sebesar 79,5 jauh lebih besar daripada nilai R dalam tabel sebesar 61. Sehingga berdasarkan kriteria pengujian yang diberlakukan, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat pesisir utara terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime adalah sama dengan pemahaman masyarakat pesisir selatan terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritime dinyatakan diterima. Sehingga dimaknai bahwa tidak terdapat perbedaan terhadap pemahaman baik masyarakat yang berada di pesisir utara maupun di pesisir selatan.

Potensi maritim yang luar biasa jumlahnya masih diabaikan oleh bangsa kita. Banyak manfaat belum dapat dinikmati karena pengabaian ini, diantaranya: pertama, belum ada optimalisasi yang dikembangkan oleh Indonesia selama ini terhadap potensi bioteknologi maritimnya. Perkiraan yang diperoleh dari nilai ekonomi yang terkandung meliputi hampir 40 miliar USD yang diantaranya berupa bioethanol, makanan dari bahan laut, pemanfaatan obat untuk anti kanker, bahkan pembuatan kertas.

Kedua, bangsa Indonesia harus memberikan penekanan terhadap pembangunan sektor perikanan di masa depan. Perbandingan wilayah laut yang lebih luas daripada daratan menyimpan banyak potensi perikanan yang belum termanfaatkan secara maksimal. Pembangunan dan pemanfaatan sektor perikanan merupakan potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, bahkan dapat diandalkan untuk menciptakan devisa negara.

Ketiga, komponen utama laut dengan sumber daya pesisirnya berupa terumbu karang dapat dimanfaatkan keberadaannya. Potensi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu padang lamun serta hutan mangrove. Perkiraan luas terumbu karang Indonesia melebihi 60.000 km persegi yang keberadaannya meliputi perairan di Kawasan Timur Indonesia maupun Kawasan Barat Indonesia. Kekayaan ini jelas sangat tidak ternilai harganya.

Keempat, keberadaan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) sebagai potensi yang luar biasa. Keunggulan ALKI yang awalnya dicanangkan melalui Deklarasi Juanda 1957 seakan kurang termanfaatkan. Potensi dari ketiga ALKI Indonesia masih belum diberikan perhatian khusus dalam wujud pembangunan yang holistik. ALKI ini dijadikan lalu Lalang kapal-kapal asing begitu saja tanpa adanya pemanfaatan yang dapat diperoleh untuk modal pendukung

pembangunan Indonesia sebagai negara maritim. Singapura sebagai negara dengan wilayah kecil yang wilayahnya hanya dilintasi jalur perdagangan dunia dapat menghasilkan devisa yang besar untuk negaranya dengan pemanfaatan yang maksimal.

Kesadaran atas geografi Indonesia masih sangat jarang melekat pada penduduknya. Kesadaran ini semestinya menjadi sesuatu yang sangat patut dibanggakan. Pengetahuan geografi maritim yang baik akan menghantarkan pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi perairan atau laut kita maupun segala potensi dan kandungan kekayaan yang terdapat didalamnya. Jumlah pulau lebih dari 17.449 menawarkan berbagai limpahan yang meliputi mineral tambang, kerang-kerangan, bermacam jenis ikan, keberadaan taman laut (Antony, 2022). Kurikulum pengajaran Geografi yang masih minim dapat dilihat sebagai kelemahan mendasar terhadap kesadaran Geomaritim tersebut. Geografi dalam kurikulum kita hanya merupakan materi kecil dalam pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Bangsa ini harus memberikan titik berat pada penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautannya. Kesadaran Geomaritim ini harus diberikan secara berjenjang dimulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) dengan harapan setelah lulus sudah memiliki wawasan bahari yang memadai untuk selanjutnya semakin diperbanyak tingkat pemahamannya di tingkat selanjutnya. Dukungan pemerintah terhadap pendirian SMK Kelautan harus konkret dan semakin nyata. Pemahaman yang berjenjang ini akan mencapai piramida tertinggi dengan pengembangan kajian dan litbang kelautan di tingkat perguruan tinggi (Salim, 2014).

Langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan agama dalam rangka kebangkitan kedaulatan maritim harus ditempuh dengan menekankan pada beberapa aspek yang diantaranya meliputi: fokus esensi pendidikan dan pengajaran agama untuk menghilangkan pengkotak-kotakan pemahaman ritual; pengutamaan proporsionalitas pemenuhan kebutuhan maritim dengan berdasarkan pada pendidikan kelautan berbasis Pancasila mengingat wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratnya; dan penciptaan lapangan kerja dalam bidang maritim dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian terhadap independensi disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tinggi rendah pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim. Materi terkait karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim harus diajarkan sedini mungkin di tingkatan sekolah sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman yang holistik terhadap karakter yang memang dimiliki oleh bangsa ini secara turun temurun. Hasil pengujian hipotesis melalui metode Kruskal-Wallis diperoleh bahwa terdapat perbedaan terhadap pemahaman atas karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim oleh para responden yang merupakan masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat pesisir. Hasil pengujian ini menyatakan perlunya penyesuaian terhadap materi pendidikan terkait karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim sehingga masyarakat sebagai kesatuan yang holistik harus mempunyai pemahaman yang sama untuk menjatidirikan masyarakat sebagai bagian negara yang bercirikan maritim. Sementara dari pengujian hipotesis dengan jumlah jenjang terstrata Wilcoxon disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat pesisir utara terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah

negara maritime adalah sama dengan pemahaman masyarakat pesisir selatan terhadap karakter bangsa dan karakter pemerintah negara maritim dinyatakan diterima. Sehingga dimaknai bahwa tidak terdapat perbedaan terhadap pemahaman baik masyarakat yang berada di pesisir utara maupun di pesisir selatan.

Rekomendasi kebijakan yang diberikan dari penelitian ini bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia membangkitkan kembali kesadaran bahwa laut harus dipandang sebagai kesatuan wilayah, sumber kehidupan, media perhubungan utama, wahana merebut pengaruh politik dan wilayah utama penyangga pertahanan. Caranya, kita harus mau belajar dan memahami sejarah. Kita harus mempelajari visi, misi dan tindakan nyata yang dilakukan nenek moyang kita, sehingga mereka dapat meraih kejayaan. Sebaliknya kita juga harus mempelajari apa yang membuat kejayaan itu surut, mengecil dan akhirnya tergerus dari paradigma laut ke darat. Oleh karena itu, penjatidirian masyarakat melalui pendidikan karakter bangsa dan pemerintah negara maritim menjadi rekomendasi yang logis untuk mengembalikan kejayaan maritim nenek moyang kita dengan menanamkan kesadaran budaya maritim sedalam dalamnya pada semua lapisan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony, A.B. (2022). Emerging Significance and Challenges of Maritime Industry. *Journal of Research & Development: A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal*, 13(4), 93-96.
- Arif, W., & Yanto, A. (2022). Konsep Makna Keamanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(3), 227-234.
- Aritz, J., & Walker, R. (2017). Discourse of leadership: The Power of Questions Organizational Decision making. *International Journal of Business Communication*, 54, 164-166.
- Asmara, R., Octavian, A., & Hidayat, A.S. (2020). Sumber Daya Strategi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Pengendalian Laut Di Selat-Selat Strategis Guna Mendukung Sistem Pertahanan Semesta. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(2), 154-163.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security?. *Marine Policy*, 53(1), 159-164.
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 93(6), 1293-1311.
- Buntoro, K. (2019). *Nusantara & ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Clorinda, J.I.U., Santoso, M.I., & Widodo, H. (2019). Pelanggaran Hak Lintas Navigasi Oleh Pesawat Asing Di Ruang Udara Teritorial Indonesia. *Jurnal Krisna Law*, 1(3), 77-86.
- Delanova, M.O., & Yani, Y.M. (2020). Dampak Kebijakan Amerika Serikat Di Indo-Pasifik dalam Menghadapi China Terhadap Keamanan Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 79-97.
- Hadiwijaya, B. (2022). Strategi Pertahanan Maritim Di Laut Natuna Utara dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 418-429.
- Hamid, A.R. (2013). *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Handayani, S. (2018). Strategi Pertahanan Maritim Republik Rakyat Tiongkok Di Laut Cina Timur. Skripsi FISIP Universitas Jember.
- Haras, Y.M. (2017). Peran TNI AL dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan. *Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan*, 3(2), 1-14.

- Hendrawan, A. (2020). Potensi Daerah dan Daya Saing Daerah Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen. *Jurnal Litbang Sukowati*, 4(1), 75-90.
- Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Analisa Ancaman dan Kekuatan Laut. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 363-371.
- Hidayat, S., & Ridwan. (2017). Indonesia's Maritime Axis Policy and National Security: Challenges and Hopes. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3).
- Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M.I., & Uksan, A. (2022). Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 16(1), 29-42.
- Irpan, T., Sony, I., & Sarinah. (2016). Study of Increasing the Role of Multimodal Transportation in Realizing Indonesia's Logistics Vision 2015. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, 3(1).
- Marsetio, (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Marsetio. (2015). *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh*. Disampaikan pada acara Kuliah Umum di hadapan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(2), 17-36.
- Nugraha, M.H.R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 175-182.
- Porlida, E., & Kafaridis, S. (2016). Maritime Industry: The Impact of Freight & Crude Oil Rates on the stock Performance of Shipping Companies. Tesis School of Economics, Business Administration & Legal Studies, International Hellenic University.
- Prasetyo, K.A., Prakoso, L.Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 31-50.
- Rosmawandi, H.Y. (2022). Kedudukan Geopolitik Indonesia dalam Dinamika Rivalitas China dan Amerika Serikat. *Change Think Journal*, 1(2), 124-135.
- Rustam, I. (2017). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-Cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Indonesia Perspective*, 1(1), 1-21.
- Salim. (2014). *Kodrat Maritim Nusantara: Catatan Strategis Kemaritiman*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Till, G. (2018). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Cass Series: Naval Policy and History (4.th ed.). Milton: Routledge.